

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sebagai salah satu permasalahan global yang masih dihadapi oleh hampir seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia saat ini masih menghadapi kemiskinan sebagai masalah krusial yang dapat menghambat pencapaian dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik Nasional mencatat bahwa meskipun angka kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, pada Maret 2024 menunjukkan angka 9,03 % penduduk miskin atau sekitar 25,22 juta orang dengan garis kemiskinan.

Masih banyak orang hidup sedikit di garis kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik Nasional namun secara global tetap dianggap miskin. Disisi lain, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural misalnya kesempatan kerja, upah yang rendah, dan biaya hidup yang tidak mudah (Septiani & Muchtholifah, 2022). Maka dari itu, tantangan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia bukan hanya berbicara persoalan angka statistik, namun meliputi kualitas kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan terhadap masalah kemiskinan, salah satunya dengan pengendalian laju inflasi.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan terus menerus. Inflasi bisa membawa dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat inflasinya. Ketika inflasi berada pada level yang rendah, hal ini justru memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan merangsang aktivitas ekonomi. Namun, ketika inflasi melonjak terlalu tinggi, kondisi ini dapat melemahkan perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh Zaharani & Nasir (2024) menemukan bahwa ketika inflasi mengalami kenaikan yang terlalu tinggi ini akan cenderung mengganggu aktivitas ekonomi sehingga bisa menghambat pertumbuhan yang tercerminkan dalam melemahnya daya beli masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi.

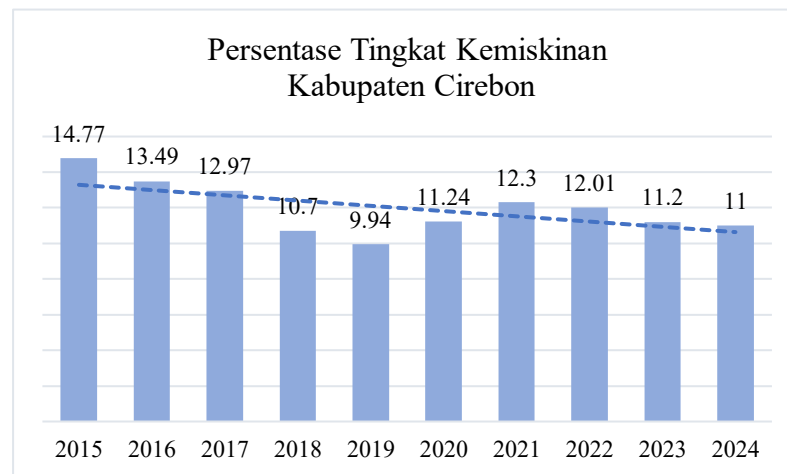
Faktor lain yang menimbulkan terjadinya kemiskinan adalah kurangnya sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur suatu pencapaian pembangunan individu yang tergambar dalam berbagai kualitas hidup yang mendasar dan berpengaruh pada produktivitas individu. Menurut Syofa (2018) produktivitas yang rendah akan berdampak pada rendahnya penghasilan yang kemudian menimbulkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Maka indeks pembangunan manusia bisa berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui produktivitas yang tinggi yang tercermin dalam komponen yang mencakup tingkat harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran perkapita (Syafaillah & Gandasari, 2016).

Faktor lainnya dapat dilihat pada upah minimum, sebagai salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kebijakan upah minimum mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menandakan adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Penelitian oleh Lube et al. (2021) menunjukkan bahwa kenaikan dari upah minimum bukan hanya berdampak pada tenaga kerja, namun juga dapat memicu peningkatan daya beli masyarakat, karena upah yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya peningkatan konsumsi yang kemudian dapat merangsang produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.

Kemiskinan di Jawa Barat masih menjadi permasalahan kompleks yang mungkin disebabkan oleh ketimpangan pembangunan antar wilayah. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2025 adalah 7,02% (BPS Jawa Barat, 2025). Tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat juga bisa menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, pada April 2026 jumlah penduduk mencapai 51,16 juta jiwa sehingga menjadikannya salah satu provinsi terpadat di Indonesia (BPS Jawa Barat, 2025). Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja maka dapat meningkatkan jumlah masyarakat miskin dengan penghasilan rendah.

Beberapa wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam mengatasi pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi diatas rata-rata provinsi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa

tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon dengan persentase penduduk miskin telah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.



Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Cirebon

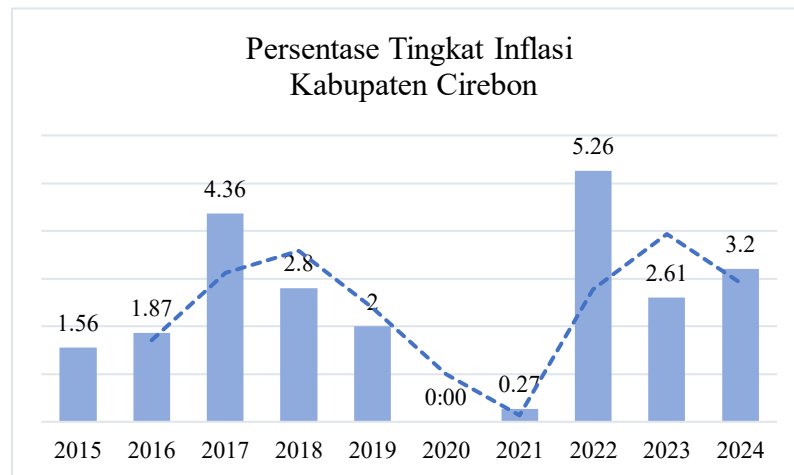
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon 2015-2024

Berdasarkan grafik 1.1 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon di awal periode 2015 sampai dengan 2019 terjadi penurunan yang signifikan. Meskipun ditahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan kembali naik tajam mencapai 13,92% yang kemungkinan terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan sebesar 11% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 11,22%. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon menunjukkan penurunan, namun angka kemiskinan tetap relatif tinggi dan menjadi perhatian dalam pembangunan lokal.

Disisi lain, garis kemiskinan perkapita juga mengalami kenaikan menjadi Rp.475.046 / bulan atau naik sekitar 5,13% dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2024). Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat miskin semakin tertetakh oleh kenaikan biaya kebutuhan hidup. Sehingga meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun biaya hidup minimum terus meningkat sehingga tetap menekan stabilitas sosial ekonomi kelompok masyarakat miskin.

Dinamika kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya laju inflasi. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan diantaranya melalui pengendalian terhadap laju inflasi. Inflasi yang berhubungan dengan harga komoditas pokok dapat mengurangi daya beli

masyarakat miskin dan memperdalam kerentanan ekonomi. Badan Pusat Statistik nasional mencatat bahwa inflasi Indonesia ditahun 2024 adalah sebesar 1,57 % YoY yang menunjukkan harga barang secara umum naik dalam satu tahun (Badan Pusat Statistik, 2025).



Gambar 1.2 Tingkat Inflasi di Kabupaten Cirebon

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon 2015-2024

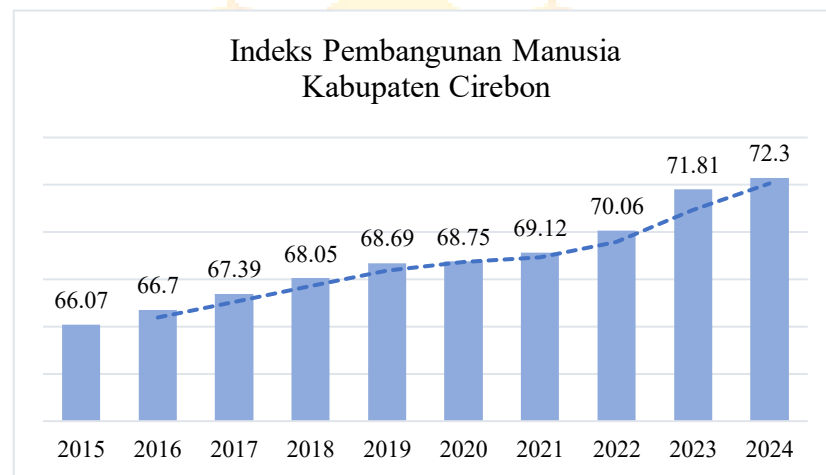
Berdasarkan garifik 1.2 menunjukkan persentase inflasi Kabupaten Cirebon selama periode 2015 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Ditahun 2015 inflasi tercatat sebesar 1,56% yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 1,87% ditahun berikutnya. Namun ditahun 2017 inflasi mengalami lonjakan yang cukup tinggi sebesar 4,36% menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup kuat pada tahun tersebut.

Akan tetapi, ditahun 2020 angka inflasi mengalami penurunan yang tajam menjadi 0,29% dan kembali turun ditahun 2021 menjadi 0,27%. Kondisi ini mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi sebagai dampak adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan permintaan masyarakat menurun secara signifikan. Ditahun 2022 inflasi kembali meningkat tajam sebesar 5,26% ini mungkin dipengaruhi oleh meningkatkan harga pangan pasca pandemi yang beriringan dengan pemulihan aktivitas ekonomi.

Pemerintah berupaya untuk melakukan pengendalian laju inflasi sehingga dapat mengalami penurunan kembali ditahun 2023 dan 2024 menjadi 3,2%. Inflasi di Kabupaten Cirebon selama periode 2015 – 2024 bersifat fluktuatif. Artinya fluktuasi inflasi dapat menjadi permasalahan yang disebabkan

perubahan harga yang tidak stabil secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok dengan pendapatan rendah. Ketika inflasi meningkat, maka harga kebutuhan pokok cenderung naik lebih cepat. Namun, ketika inflasi berada pada tingkat yang rendah, seperti yang terjadi ditahun 2020 – 2021 ini juga mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi dan keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia bisa diukur menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai cermin dari aspek pendidikan, standar hidup dan kesehatan yang menjadi hal penting untuk jangka panjang, sebab kualitas dari sumber daya manusia akan berdampak pada produktivitas dan potensi pendapatan masyarakat.



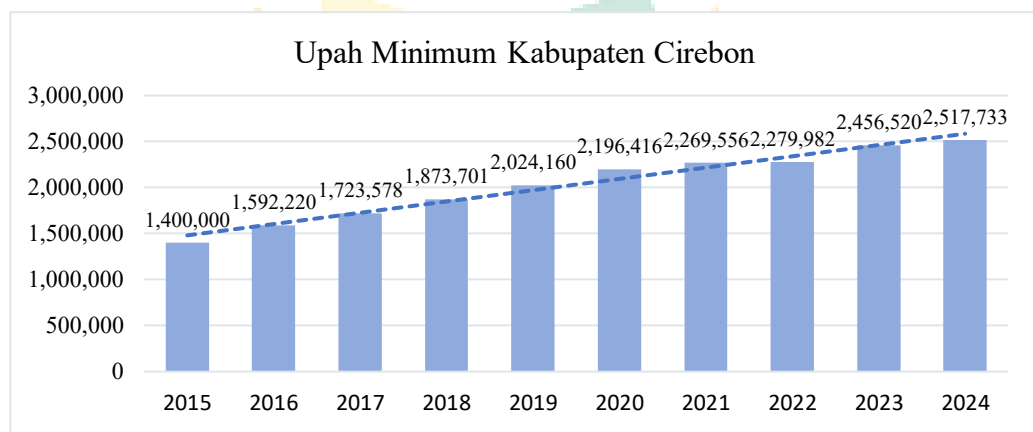
Gambar 1.3 Tingkat IPM di Kabupaten Cirebon

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2024

Melihat dari grafik 1.3, IPM mengalami peningkatan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Pada awal periode 2015, nilai IPM sebesar 66,07% yang kemudian meningkat menjadi 66,71% pada tahun 2016. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sebagai cerminan dari adanya perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga standar hidup masyarakat. Pada tahun 2020 nilai IPM mengalami perlambatan peningkatan yang diduga dipengaruhi oleh akibat dari *Covid-19* yang dimana kondisi ini tentunya menyebabkan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak berjalan secara optimal seperti tahun-tahun sebelumnya meskipun IPM masih terus menunjukkan arah yang positif hingga akhir periode penelitian.

Meskipun indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang berarti menunjukkan adanya perbaikan dari indikator kualitas hidup, namun kondisi ini tidak sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Ini berarti peningkatan kualitas pembangunan manusia belum secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Dalam konteks penelitian ini, upah minimum sebagai mediator yang menghubungkan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan.

Peningkatan dari kualitas kesehatan dan pendidikan diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang nanti akan berdampak pada peningkatan upah. Dalam konteks ketenagakerjaan, *upah minimum* merupakan salah satu instrumen penting yang dapat memperkuat daya beli tenaga kerja dan keluarga pemegang upah. Penetapan upah biasanya mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten Cirebon

*Sumber : Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum
Kabupaten di Jawa Barat 2015-2024*

Pada grafik 1.4 menunjukkan upah minimum Kabupaten Cirebon di tahun 2015 sebesar Rp 1.400.000 dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2022 kenaikan upah minimum hanya Rp 10.426. Selanjutnya di tahun 2023 upah minimum sebesar Rp 2.456.520 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp 2.517.733. Data tersebut dapat mencerminkan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

penyesuaian kenaikan upah dengan kebutuhan hidup layak ditengah perkembangan kondisi ekonomi.

Upah minimum sebagai mediator dalam penelitian, karena upah menjadi salah satu yang bisa menghubungkan pengaruh inflasi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan. Secara teori, inflasi bisa memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian upah untuk menjaga daya beli masyarakat (Andriyani et al., 2025). Disisi lain, peningkatan indeks pembangunan manusia bisa mencerminkan adanya peningkatan pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja sehingga bisa memengaruhi besarnya upah yang diterima. Selanjutnya upah minimum berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Namun kenaikan dari upah minimum tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Upah minimum ditetapkan untuk melindungi daya beli pekerja dan juga pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup layak. Akan tetapi, kenaikan upah minimum tidak bisa sepenuhnya mampu mengimbangi laju inflasi dan kenaikan biaya hidup. Sehingga upah riil yang diterima pekerja tidak mengalami peningkatan, artinya upah belum secara langsung dapat menurunkan angka kemiskinan. Sementara itu, pembangunan menunjukkan adanya upaya perbaikan, namun belum sepenuhnya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

Ini bisa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan dari kualitas sumber daya dan kebijakan upah. Disisi lain juga, inflasi yang terjadi tidak selalu memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan, sehingga hubungan bisa dikaji lebih lanjut. Namun, hubungan antara inflasi dan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan tidak selalu bersifat terjadi langsung. Dengan demikian, upah minimum menjadi variabel yang berperan sebagai penghubung antara kondisi ekonomi makro, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian daerah, tingkat pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Inflasi yang terjadi secara menerus, bisa berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Disisi lain, indeks pembangunan manusia juga

bisa mencerminkan kemampuan masyarakat dalam bekerja secara produktif (Gunawan & Resmana, 2025). Masyarakat dengan kualitas sumber daya yang lebih baik, biasanya memiliki produktivitas lebih tinggi, sehingga terdapat peluang dalam memperoleh pekerjaan dan tingkat upah yang lebih baik. Dengan demikian, upah minimum bisa digunakan sebagai penghubung antara peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian menemukan bahwa inflasi dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, misalnya penelitian oleh Simanungkalit (2023) yang hasilnya menunjukkan pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan adalah positif dan signifikan. Sementara penelitian Septiani & Muchtholifah (2022) menunjukkan bahwa pengaruh dari inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat adalah positif namun tidak signifikan.

Disisi lain, Kabupaten Cirebon memiliki kondisi ekonomi yang berbeda dengan daerah perkotaan atau kawasan industri besar karena masih didominasi sektor informal. Salah satu penelitian oleh Abas et al. (2025) yang meneliti mengenai dampak upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja informal di Kabupaten Karawang, hasilnya menunjukkan bahwa implementasi dan dampak dari upah minimum masih terbatas terhadap pekerja di sektor informal, karena tidak termasuk kedalam pengupahan formal. Dengan demikian, tingginya upah minimum juga belum sepenuhnya bisa menjangkau seluruh lapisan tenaga kerja, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan juga masih terbatas.

Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya dipengaruhi langsung oleh faktor makro ekonomi dan kualitas pembangunan manusia. Inflasi mencerminkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup masyarakat. Sementara itu, kenaikan upah diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang selanjutnya bisa meningkatkan kualitas sumber daya dan peningkatan kesejahteraan. Namun, jika upah minimum tidak meningkat secara proposional,

maka dampak dari indeks pembangunan manusia yang meningkat masih belum merata terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dengan melakukan analisis keterkaitan inflasi, indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan dengan menggunakan upah minimum sebagai mediator di Kabupaten Cirebon selama periode 2015 sampai 2024. Rentang waktu yang cukup panjang yang dimulai dari sebelum pandemi, masa kritis akibat pandemi *covid-19* sampai dengan fase pemulihan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap perubahan struktur dan kinerja ekonomi daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon selama periode 2015-2024.
2. Inflasi tidak selalu konsisten menurunkan atau meningkatkan kemiskinan dalam beberapa tahun.
3. Indeks pembangunan manusia meningkat tetapi tidak sejalan dengan penurunan kemiskinan secara stabil.
4. Upah minimum mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dampaknya terhadap kemiskinan belum secara empiris.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Penulis menggunakan tiga variabel, yaitu kemiskinan sebagai dependen, sementara ipm dan inflasi berperan sebagai independent, disisi lain upah minimum adalah sebagai mediator (intervening) dalam penelitian yang akan dilakukan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti menyusun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap upah minimum di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 – 2024 ?

2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap upah minimum di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 – 2024 ?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2015 – 2024?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2015 – 2024?
5. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 – 2024 ?
6. Apakah upah minimum memediasi pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2015-2024 ?
7. Apakah upah minimum memediasi pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2015 – 2024

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat upah minimum di Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh IPM terhadap upah minimum di Kabupaten Cirebon
3. Untuk menguji pengaruh dari inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon
4. Untuk menguji pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon
5. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon
6. Untuk menjelaskan peran upah minimum sebagai variabel mediasi dalam pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon
7. Untuk menjelaskan peran upah minimum sebagai variabel mediasi dalam pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan bisa untuk memperluas wawasan, menambah informasi, dan memberikan pengetahuan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi dunia akademik, khususnya sebagai referensi atau rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- b. Bagi penulis penelitian ini diharapkan menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman akan isi dari laporan penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir, maka penulis memaparkan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bagian ini berisi mengenai teori yang digunakan dan mendasari analisis dari inflasi, ipm, upah minimum, dan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan mengenai pembahasan dari objek penelitian, definisi operasional variabel, model penelitian, data serta teknik analisis yang akan digunakan.

BAB IV HASIL ANALISIS

Bagian ini berisi deskripsi dari data penelitian, hasil dari pengujian hipotesis, kemudian pembahasan dari hasil penelitian, dan analisa hubungan dari variabel yang digunakan.

BA V KESIMPULAN

Bab kesimpulan mengkaji dari keseluruhan hasil penelitian serta berisikan juga saran dan rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan.

